

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada era milenial saat ini dengan melihat situasi ekonomi yang sangat kritis di Indonesia, setiap orang pasti memiliki kepentingannya masing-masing. Mulai dari kepentingan memperoleh ilmu, kepentingan politik, hingga meraup keuntungan. Termasuk mengenai politik ekonomi dan organisasi *Non-Profit*, yang saat ini sangat gencar-gencarnya melaksanakan kegiatan ataupun suatu acara yang dapat membuat perspektif sempurna dihadapan masyarakat. Contohnya yakni disetiap OPD (Organisasi Perangkat Daerah) yang tiap periode baik per minggu, per bulan, maupun per tahun memiliki strategi dan rencana program kerjanya masing-masing. Mulai dari penyuluhan dari Dinas Kesehatan hingga Pelatihan Kerja dari Dinas Tenaga Kerja.

Hal ini juga tidak menutup kemungkinan bahwa organisasi pada tingkatan pelajar/mahasiswa yang juga berlebel organisasi *Non-Profit* mencoba untuk berlomba-lomba membuat program kerja layaknya Aparatur Sipil Negara (ASN) yang bekerja pada Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Mulai dari seminar dan kajian hingga membuat pelatihan kepemimpinan bagi pelajar dan tingkatannya. Contohnya organisasi keolahragaan, Kesenian, hingga pada organisasi Praja Muda Karana (Pramuka) yang menjadi garda terdepan untuk pendidikan kewarganegaraan dan wawasan kebangsaan.

Organisasi Pramuka merupakan organisasi kepanduan yang berkaitan dengan organisasi pemerintah terutama Dinas Pendidikan. Struktur tingkatannya

mulai dari Kwartir Nasional hingga Kwartir Ranting di tingkat Kecamatan. Organisasi Pramuka juga memiliki banyak program kerja yang sudah direalisasikan tiap periodenya. Hal tersebut tidak lepas dari anggaran keuangan yang turun dari pemerintah daerah serta oknum tidak bertanggung jawab yang siap untuk melahap keuntungan dari dana yang turun dari pemerintah dengan segala cara untuk mendapatkannya.

Ada banyak contoh kasus di Indonesia mengenai oknum organisasi yang sudah terungkap oleh pihak berwenang contohnya KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) yang mengungkap banyak kasus penyuapan dan penggelapan uang negara. Di Indonesia sendiri beberapa tahun yang lalu terdapat kasus yang cukup menarik yaitu penggelapan dana hibah yang marak pada tahun-tahun terakhir ini salah satu contoh yaitu kasus Sylviana Murni yang menyangkut kasus penyalahgunaan dana hibah Kwartir Daerah Pramuka DKI Jakarta. Sylviana Murni merupakan mantan ketua Kwarda Pramuka DKI Jakarta tahun 2014 yang diduga bersekongkol dengan bendaharanya yaitu Delli Indriyanti hingga merugikan keuangan negara sebesar Rp 509.000.000, perihal *Mark Up* anggaran guna pembangunan Dinas Pendidikan. (Liputan6.com – Jakarta 2017).

Melihat dari salah satu contoh kasus korupsi diatas, terdapat hal unik yang dapat digunakan untuk acuan penelitian, sebagaimana kasus yang berkaitan dengan sistem birokrasi dan laporan keuangan yang ada di organisasi dibawah kucuran dana hibah. Mengenai laporan keuangan seharusnya terdapat informasi yang sesuai terkait laporan posisi keuangan, kinerja dari entitas dan informasi lainnya yang mungkin dapat disajikan. Hal ini karena laporan pengguna beragam dan membutuhkan data yang akurat sebagai bahan pertimbangan dalam pembuatan keputusan. Manajemen keuangan memiliki kesempatan rawan *Fraud*

terhadap pelaporan keuangan karena mereka yang bertanggung jawab atas pembuatan laporan itu (Kanapickiene, 2015).

Salah satu Kwartir cabang (Kabupaten X) di Jawa Timur yang mana dijadikan sebagai objek dari penelitian ini adalah Kwartir cabang yang biasa disebut Kwarcab (Kabupaten X) beroperasi kurang lebih selama 20 Tahun. Dimana Kwartir cabang (Kabupaten X) di setiap tahun dan periode kepemimpinan memiliki program kerja untuk anggota dewasa atau pembina pramuka hingga kegiatan anggota muda, mulai dari tingkat siaga, penggalang, penegak, dan pandega. Anggaran dari seluruh kegiatan rata-rata berasal dari dana hibah pemerintah daerah yang disampaikan oleh dinas kepemudaan dan olahraga (Dispora).

Peneliti memilih Kwartir cabang (Kabupaten X) karena terdapat kejanggalan dari pihak pada salah satu kegiatan yang telah berlangsung. Kejanggalan tersebut yaitu berupa laporan bukti transaksi dari salah satu panitia kegiatan yang tidak rasional kepada pihak kwarcab. Hal tersebut masuk dalam kategori *Fraud Diamond Theory* yang memunculkan permasalahan yang menjadi fokus penelitian ini.

Berikut pernyataan dari salah satu anggota panitia (Kak Sholeh) yang terlibat dalam kegiatan di Kwarcab (Kabupaten X) sebagaimana berikut :

“Dana Hibah itu mas... yang akan menjadi acuan bagi Kwartir Cabang dan LSM yang lainnya dalam merencanakan Penganggaran serta membuat Program Kerja tahunan. Sebab anggaran dari program kerja 60% dana didapatkan langsung dari dana Hibah dan 40% berasal dari dana Sponsorship. Dari hal ini mas... munculnya beberapa kesempatan untuk berbuat curang (Fraud), seperti itu mas yang dinamakan salah yang menjadi kaprah”.

Dari pernyataan diatas peneliti menyimpulkan bahwa menurut mereka dengan dimulainya kepentingan pribadi hingga mengaitkan kepentingan

organisasi merupakan solusi birokrasi yang tepat dalam meraup keuntungan sebesar-besarnya artinya semua urusan birokrasi tidak ada yang “*Gratis*”.

Pendapat lain juga peneliti dapatkan dari (Kak Yono) salah satu Purna Dewan Kerja Cabang Pramuka sebagai berikut :

“Banyak sekali Dewan Kerja Cabang di beberapa kota di Jawa Timur memiliki cara tersendiri yang cenderung sedikit mempercantik\ dalam proses penganggaran dan laporan pertanggung jawaban. Kejadian tersebut sebenarnya dapat dilihat dengan metode Subsidi Silang yang sebenarnya merupakan tabir dan terkesan abu-abu terhadap masyarakat, ini merupakan hal yang ada di kalangan Kwartir Cabang Maupun Daerah, Jadi merupakan Kebiasaan yang umum dan wajar mas. Yaa.. mungkin saja mas tidak sesuai dengan standar atau regulasi yang ada!”

Dari pernyataan diatas Peneliti beranggapan bahwa untuk proses pelaporan mungkin saja tidak sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan dan PSAP. Secara logika organisasi yang berlisensi “*Profit Oriented*” merupakan lembaga profit yang program utama atau tujuan utamanya memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dari proses produksi maupun usahanya. Sedangkan menurut Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga atau AD/ART yang ada di organisasi Pramuka merupakan organisasi nirlaba yang bersifat nasionalisme atau bisa juga disebut dengan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).

Peneliti juga memperkuat pernyataan dari Kak Iryanu selaku anggota Dewan Kerja Cabang yakni sebagai berikut :

“Fraud tersebut dimulai ketika pemerintah daerah memberikan anggaran tersebut jika Dewan Kerja Cabang membuat rencana anggaran lebih besar dari laporan pertanggung jawaban maka uang anggaran ditahun berikutnya akan dikurangi dengan jumlah yang nilainya lebih sedikit dari tahun sebelumnya. Logikanya jika kita diberikan uang Rp. 10.000 oleh orangtua kita dan jika kita membelanjakannya hanya 600 maka dikeesokan harinya maka kita hanya diberi uang Rp. 700. Peristiwa ini yang membuat para pengurus memutuskan untuk mengadakan “Subsidi silang” pada periode kepengurusannya. Hingga menjadi kebiasaan turun-temurun dari periode sekarang ke periode yang akan datang. Lebih parahnya lagi hal kebiasaan ini sangat dimaklumkan oleh para pelaku organisasi di tingkatan Kota atau Kabupaten”

Hal yang sama disampaikan oleh Kak Siti yang mana beliau adalah salah satu Purna Ketua Dewan Kerja Cabang yang ada di Madura yakni sebagai berikut :

“Baik kak bayu saya akan menjelaskan pengelolaan keuangan, sebelumnya saya terlebih dahulu menjelaskan sumber keuangannya sebagaimana berikut : 1) iuran anggota 2) bantuan dari majlis pembimbing (Bupati) 3) bantuan dari APBN dari dispora 4) Badan usaha milik kwartir. Terkait pengelolaan keuangan tingkat cabang mengelola keuangan kegiatan, Sumber dana dari Kwartir cabang maka dari itu pelaporannya ke kwartir cabang. Contoh kegiatan Raimuna daerah kita mendapat dana sebesar 20 Juta adapun pelaporan keuangan yang kita ajukan sebesar 20 Juta pula sehingga di periode selanjutnya tidak akan mengalami pengurangan anggaran dan yang kita kelola sebagaimana pengelolaannya semisal dari segi konsumsi di proposal kita menulisnya Rp. 15.000/ orang. Akan tetapi pada kenyataannya kita masak sendiri. Hal yang demikian juga lumayan membantu menghemat anggaran kegiatan. Selain itu permasalahan yang ada pada kwarcab ini juga pada Penelitian Nota dan Kwitansi, ketika kita melakukan pengadaan barang dimana itu kita melakukan pembelian barang dipasar yang notabennya tidak memiliki nota, tetapi kita selaku pelaksana kegiatan juga harus lapor kepada bendahara kwarcab berbentuk nota, lah hal yang demikian inilah yang menjadi sebab kenapa pelaporan keuangan mesti tidak sesuai dengan kenyataan yang ada seperti itu. Sehingga kita membuat LPJ sesuai proposalnya, dan dana yang dihabiskan itu dibawah harga yang tercantum di proposal. Dan kelebihan uang tersebut biasanya kita masukkan di Kas. Selain di konsumsi biasanya kita juga melakukan dari segi lainnya, misal di nota kita belanja di toko tradisional yang tidak menyediakan notanya, untuk pelaporan saat LPJ maka kita beli sendiri nota dan ditulis sendiri.”

Berdasarkan Latar belakang informasi yang telah diberikan oleh salah satu pihak yang pernah terlibat keanggotaan staff Kwarcab (Kabupaten X), beberapa dari anggota DKC (Kabupaten X) dan Salah Satu Purna Ketua DKC salah satu Kabupaten yang ada di Madura serta mempertimbangkan dengan regulasi yang ada, Peneliti memilih beberapa informan pada penelitian ini dengan alasan bahwa terdapat beberapa permasalahan mengenai sistem bantuan dana berupa pencairan dana hibah yang menjadi dilema serta pengelolaan keuangan kegiatan yang cenderung *Fraud*, peneliti juga tertarik terhadap apa saja persoalan Dana Hibah yang banyak sekali oknum tidak bertanggung jawab yang mengincarnya

serta kebiasaan membuat laporan keuangan yang cenderung salah dan menjadi “*Benar*” sehingga dengan ini peneliti tertarik untuk meneliti kasus “*Fraud Pengelolaan Keuangan Pada Organisasi Kepanduan (Kwartir Cabang Gerakan Pramuka di (Kabupaten X)*”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah kami paparkan diatas peneliti mengidentifikasi sebagai berikut : Bagaimana bentuk fenomena *Fraud* pada pengelolaan keuangan kegiatan di Dewan Kerja Cabang (DKC) pada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (Kabupaten X) dengan menggunakan *Fraud Diamond Theory*?

Bagaimana bentuk *Whistleblowing* yang tepat guna untuk meminimalisir *Fraud* pada pengelolaan keuangan kegiatan di Dewan Kerja Cabang (DKC) pada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (Kabupaten X) ?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pada rumusan masalah diatas maka peneliti memiliki tujuan penelitian yakni mengetahui bentuk fenomena *Fraud* pada pengelolaan keuangan kegiatan di Dewan Kerja Cabang (DKC) pada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (Kabupaten X) dengan menggunakan *Fraud Diamond Theory*.

Untuk Memberikan Presepsi *Whistleblowing* yang tepat guna untuk meminimalisir *Fraud* pada pengelolaan keuangan giatan di Dewan Kerja Cabang (DKC) pada Kwartir Cabang Gerakan Pramuka (Kabupaten X).

1.4 Manfaat Peneltian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat atau kontribusi baik secara teoritis maupun secara empiris, sebagaimana berikut :

1.4.1 Manfaat Teoritis

- a) Bermanfaat untuk menambah kepustakaan dan bisa dipergunakan sebagai referensi dalam penelitian dan analisa pada penelitian yang serupa.
- b) Bermanfaat sebagai bahan acuan untuk mengkaji dan menganalisis penelitian selanjutnya mengenai pengembangan teori *Fraud* pada pengelolaan dana publik di suatu instansi atau organisasi publik, khususnya pada organisasi Dewan Kerja Cabang (DKC).

1.4.2 Manfaat Empiris

Secara khusus bagi pihak Kwartir Cabang Gerakan Pramuka adalah untuk memberikan pandangan terlebih pada anggota organisasi yang terlibat dalam kebijakan anggaran dan perencanaan anggaran. Serta bisa digunakan sebagai evaluasi atas kinerja yang telah dilakukan untuk pengambilan keputusan bagi periode selanjutnya.